



KORAN	HAL
Haluan	13
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# 4 Ranperda Tak Disahkan DPRD

**PYAKUMBUH, HALUAN** — Terkait tidak disahkannya 4 Ranperda oleh DPRD Payakumbuh pada Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan, Senin lalu (21/10), mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku. Riza cukup menyayangkan tidak disahkannya 4 Ranperda tersebut.

“Ya ndak apa-apa, itu hak dewan mau sahkan atau tidak. Cuman kalau sering-sering membahas ranperda

tapi endingnya tidak disahkan sama saja dengan buang duit rakyat,” ujar Riza kepada wartawan, Kamis (24/10).

Menurut Riza, setiap pembuatan Perda ada biayanya. Satu perda menghabiskan anggaran minimal Rp 1 milyar. Ongkos tersebut adalah jalan-jalan anggota dewan atas nama

studi banding dan konsultasi teknis.

“Kalau trennya begitu ya ke depan lebih baik nggak usah ada pembahasan perda. Kasihan duit rakyat. Bayangkan kalau duit itu dijadikan perbaikan jalan atau drainase atau beasiswa anak kurang mampu? Sudah sangat banyak yang bisa dibuat,” ucapnya.

Dikatakan Riza, tanpa adanya perda-perda tersebut, roda pemerintahan Payakumbuh bisa jadi terganggu. “Tapi masih bisa kita bekerja dengan perda yang sudah ada atau seadanya kecuali Perda APBD. Kalau Perda APBD lebih rumit kalau tak disahkan. Tapi, kalau Perda APBD pun tidak dibahas, ada jalan

keluarnya,” tuturnya. Sebelumnya, 4 Ranperda yaitu Ranperda tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, Ranperda Tatacara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dan Ranperda tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tidak jadi disahkan oleh DPRD Payakumbuh. DPRD mengharuskan kehadiran Wali Kota Riza Falepi dan menolak Wakil Wali Kota Erwin Yunaz yang hadir mewakili kepala daerah pada sidang paripurna tersebut. (h/mg-ari)